

**ORIENTASI POLITIK PEMILIH PEREMPUAN
DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2019**

Oleh: Meggi Azhari

Email: meggiazhari@gmail.com

Dosen Pembimbing: Dra. Hj. Wan Asrida, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research begins with the emergence of the phenomenon in the city of Bukittinggi, that in the 2019 legislative elections there were a majority of women in each electoral district of Bukittinggi, but only two women were elected. The author examines this phenomenon in order to describe and analyze the Political Orientation of Women Voters in the Legislative Election of Bukittinggi City in 2019. This study provides an objective picture of the political orientation of women voters. The political orientation of the female voters referred to in this study is how the orientation of the female voter thinks to choose or make a choice to a candidate in the 2019 Legislative General Election in Bukittinggi City. This orientation includes three aspects, namely cognitive, affective, and evaluative.

In this study, the authors used a quantitative approach to the type of descriptive research. The sample selection is done by area sampling technique. The measurement scale in this study uses a Likert scale. Data collection techniques are carried out by giving questionnaires directly to respondents to be answered. The data obtained is then presented in tabular form and discussed descriptively according to the existing theory.

The results showed that there was no influence on the number of female voters with women candidates being elected. The Political Orientation of Women Voters in the Legislative Election of Bukittinggi City in 2019 was influenced by the similarity of their hometown, residential area, religion and ethnicity with legislative candidates. Women voters in making their choices are purely their own choices, meaning that they are not influenced by others, whether they are husbands, immediate family members or local traditional leaders.

Keywords: *Political Orientation, Women's Voters, Legislative Elections*

PENDAHULUAN

Partisipasi politik adalah kegiatan seorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, salah satunya melalui Pemilihan Umum (Miriam Budiardjo, 2014:367). Setiap warga negara diberikan kebebasan untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, sesuai UUD 1945 pasal 1 ayat (1) dan (2), pasal 2 ayat (1), pasal 6A ayat (1), pasal 19 ayat (1), pasal 22C ayat (1), pasal 27 ayat (1) dan (2), pasal 28 D ayat (3) dan pasal 28 E ayat (3).

Dieter Nohler (2008) mendefinisikan Pemilu dalam dua pengertian yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit (Khairul Fahmi, 2012:52). Dalam arti luas Pemilu adalah segala proses yang berhubungan dengan hak pilih, administrasi pemilihan dan perilaku memilih. Sedangkan dalam arti sempit adalah suatu cara dimana pemilih dapat mengekspresikan pilihan politiknya melalui pemberian suara, kemudian suara tersebut ditransformasikan menjadi kursi di parlemen atau pejabat publik.

Pemilihan umum anggota legislatif adalah pemilihan umum yang digunakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota (Khairul Fahmi, 2012:14).

Berbagai upaya dilakukan pemerintah dan organisasi perempuan untuk meningkatkan 30% keterwakilan perempuan di legislatif salah satunya melalui tindakan *affirmatif action*, yaitu setiap partai politik yang ikut serta dalam pemilu wajib menyertakan 30% caleg perempuan. Namun hasilnya 30% keterwakilan perempuan di legislatif belum tercapai. Lebih dari setengah

penduduk Indonesia adalah perempuan, dan mereka tidak memiliki wakil yang sepadan di legislatif.

Tabel 1.1
Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Bukittinggi

Periode	Jumlah Kursi	P	%
2009-2014	25	4	16
2014-2019	25	2	8
2019-2024	25	2	8

Sumber: Data Olahan Penulis dan kota-bukittinggi.kpu.go.id

Jika melirik sedikit pada hasil pemilu 2009 di Kota Bukittinggi, dari 25 jumlah kursi yang diperebutkan, 4 kursi diantaranya diisi oleh perempuan. Jika dihitung persentasenya maka perolehan kursi perempuan terhadap laki-laki adalah 16%. Angka ini jelas menurun pada pemilu 2014. Hanya 2 kursi dari 25 kursi yang diperebutkan, itu artinya hanya 8% kursi yang diperoleh caleg perempuan, dan jelas ini mengalami penurunan. Setelah mengalami penurunan pada pemilu 2014, dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dan organisasi perempuan untuk meningkatkan 30% keterwakilan perempuan di legislatif pada pemilu 2019, diharapkan adanya peningkatan jumlah kursi parlemen perempuan. Namun sayangnya hal itu tidak terjadi seperti yang tergambar pada tabel 1.1 diatas.

Kota bukittinggi terdiri dari 3 Kecamatan, 24 kelurahan dengan jumlah DPT dan pengguna hak pilih perempuan lebih besar dibanding jumlah DPT dan pengguna hak pilih laki-laki. Terdapat 3 dapil dalam pemilu legislatif tahun 2019 di Kota Bukittinggi, yaitu dapil 1

Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, dapil 2 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dan dapil 3 Kecamatan Guguk Panjang.

Jumlah DPT perempuan terbanyak ada pada dapil 1 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan yaitu 17.758 orang. Begitu juga untuk pengguna hak pilih yaitu 13.549 orang. Jika dipresentasikan, rata-rata DPT dan pengguna hak pilih perempuan di setiap Kecamatan melebihi angka 50% dibanding laki-laki.

Selain diberikan hak untuk memilih oleh UU, setiap warga negara juga diberikan hak untuk dipilih dalam pemilu legislatif. Dari total 306 caleg, 120 diantaranya adalah caleg perempuan. Pada pemilu legislatif tahun 2019, masing-masing partai politik peserta pemilu konsisten terhadap aturan 30% keterwakilan perempuan dalam mengusung caleg. Bahkan untuk dapil 2 presentase caleg perempuan yang diusung beberapa partai melebihi presentase caleg laki-laki. Partai tersebut adalah PKB (60%), PDIP (100%), PPP (67%) dan HANURA (60%). Untuk dapil 3 hanya satu partai yaitu partai GARUDA (67%). Sementara untuk dapil 1 masih dipegang oleh caleg laki-laki.

Posisi sentral perempuan yang diagungkan dalam sistem matrilineal terakulturasi dengan perubahan budaya dan perkembangan zaman. Keterkukungan sistem adat pada masa orde baru, membuat tumbuh suburnya paham dan pandangan baru masyarakat Minangkabau. Acap kali pembuatan kebijakan hanya berada di pihak laki-laki dan kebijakan yang dihasilkan pun tidak ramah perempuan.

Peran dan partisipasi politik perempuan Minangkabau khususnya

dalam lembaga formal dan informal masih sering terabaikan. Salah satu wujud keterabaian tersebut tercermin dari rendahnya angka-angka partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam lembaga publik baik formal maupun informal, mulai dari tingkat nagari bahkan provinsi.

Pada pemilu legislatif tahun 2019, dari total 25 kursi di DPRD Kota Bukittinggi, hanya 2 diantaranya dimenangkan caleg perempuan. Bahkan ada satu dapil yang sama sekali tidak berhasil dimenangkan oleh caleg perempuan yaitu dapil 2 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh. Padahal pada pemilu sebelumnya Kecamatan ini memiliki satu wakil perempuan dalam parlemen yaitu Hj. Nursyida, A.Ma.Pd.

Keterlibatan perempuan Minangkabau dalam politik kekuasaan dapat kita ketahui dari berbagai cerita kaba. Salah satunya kaba *Cindua Mato* bahwa kekuasaan perempuan Minangkabau sangat besar tidak hanya karena sistem matrilinearnya (garis keturunan dari garis ibu), tetapi karena memiliki kebijaksanaan memerintah.

Rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bukittinggi pada pemilu legislatif 2019 sangat disayangkan mengingat adanya kuota 30 persen yang diberikan untuk perempuan di parlemen dan jumlah pemilih perempuan yang melebihi angka 50 persen. Apalagi jika dilihat dari paham masyarakat Minangkabau yang egaliter. Tidak dibedakan secara gender, bahkan sesungguhnya perempuan Minangkabau memiliki kesempatan yang lebih untuk berkarya.

Perempuan sebagai pemilih pada Pemilu legislatif diperkirakan akan ikut memilih perempuan juga karena banyaknya calon legislatif perempuan,

namun pada kenyataannya tidak demikian sehingga tidak diketahui pasti orientasi perempuan dalam memilih. Orientasi individu terhadap objek politik dapat dipandang dari tiga hal yaitu dari aspek kognitif yaitu pengetahuan dan keyakinan, afektif yaitu perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor dan penampilannya dan evaluatif yaitu mengenai penilaian dan opini terhadap objek politik (Patminah Nularna, 2016:5).

Perempuan sebagai pemilih menjadi faktor penunjang terpilihnya caleg perempuan, karena pada dasarnya pemilih perempuan memilih kandidat perempuan adalah untuk mewakili hak suara mereka demi kepentingannya di bidang politik. Namun pada kenyataannya jumlah pemilih perempuan tidak sebanding dengan jumlah terpilihnya caleg perempuan sehingga keterwakilan perempuan di parlemen tidak proporsional dengan jumlah penduduk dan pemilih perempuan yang diwakilinya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul orientasi politik pemilih perempuan dalam Pemilu legislatif Kota Bukittinggi tahun 2019.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana orientasi politik pemilih perempuan terhadap caleg dalam Pemilihan Umum Legislatif Kota Bukittinggi tahun 2019?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui orientasi politik pemilih

perempuan terhadap caleg dalam pemilihan umum legislatif Kota Bukittinggi tahun 2019:

- Orientasi kognitif pemilih perempuan terhadap caleg dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019
- Orientasi Afektif pemilih perempuan terhadap caleg dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019
- Orientasi Evaluatif pemilih perempuan terhadap caleg dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019

Manfaat Penelitian

- Sebagai sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai bahan rujukan penelitian selanjutnya
- Menambah wawasan dan pola pikir serta penerapan berbagai kajian teoritis yang dipelajari selama masa perkuliahan
- Memberikan pemikiran baru dan ilmu pengetahuan bagi almamater sebagai rasa terima kasih yang tidak terhingga.

Kerangka Teori

Teori Orientasi Politik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), orientasi adalah pandangan yang mendasari pikiran, perhatian atau kecenderungan dalam menentukan sikap (arah, tempat dan sebagainya) dengan tepat dan benar. Jadi orientasi adalah cara pandang yang didasari oleh pikiran, perhatian serta kecenderungan yang kemudian menghasilkan sebuah sikap dan perilaku.

Orientasi politik adalah cara pandang individu dalam sistem politik yang didasari oleh pikiran yang kemudian berkembang menjadi pengetahuan, pemahaman, perasaan terkait terhadap sistem politik, peranannya, para aktor dan penampilannya serta penilaian individu terhadap objek politik sehingga

menghasilkan sebuah nilai-nilai, kepercayaan, sikap dan perilaku yang disebut dengan budaya politik (Gabriel Almond dan Sidney Verba diterjemahkan Sahat Simamora, 1984:19).

Seorang individu atau kelompok dalam pemberian suara ketika Pemilu legislatif memiliki orientasi untuk menentukan pilihannya. Menurut Almond dan Verba (Gabriel Almond dan Sidney Verba diterjemahkan Sahat Simamora, 1984:16), dengan lebih komprehensif mengacu pada apa yang dirumuskan Parsons dan Shils tentang klasifikasi tipe-tipe orientasi, yang mana orientasi itu mengacu pada aspek-aspek objek yang dibakukan dalam sistem politik, yaitu:

- a. Orientasi Kognitif, yaitu pengetahuan, kesadaran dan kepercayaan terhadap sistem politik, atau berkenaan dengan apa-apa yang dipercayai oleh warga negara yang berkaitan erat dengan apa yang terjadi dalam dunia politik, peranan dan segala kewajibannya serta input dan outputnya. Orientasi kognitif mengenai penelitian ini adalah pengetahuan pemilih perempuan yang berkaitan dengan pemilu dan calon legislatif.
- b. Orientasi Afektif, yaitu yang berisi perasaan-perasaan dan emosi-emosi terhadap objek politik. Hal ini menyangkut pada masalah ikatan emosional yang dimiliki oleh individu terhadap objek politik, yaitu berupa persamaan suku, ras, jenis kelamin, agama, persamaan dalam pilihan politik (partai) dan lain sebagainya yang meliputi perasaan atau ikatan emosional. Orientasi afektif dalam penelitian ini adalah perasaan dan sikap pemilih perempuan terhadap calon legislatif.

- c. Orientasi Evaluatif, yaitu keputusan dan pendapat tentang objek politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan. Atau dalam pengertian yang lain, tipe orientasi politik semacam ini merupakan tingkatan yang tertinggi dalam kualitas orientasi politik. Didalamnya sudah terdapat dan berisikan pemahaman yang lebih tinggi tentang sistem politik. Seseorang atau kelompok yang memiliki orientasi politik evaluatif, sudah mampu membuat keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik, yang didasarkan kepada kombinasi standar nilai dan kriteria yang didasarkan kepada informasi yang diperoleh dan perasaan tentang hal-hal tersebut. Orientasi evaluatif mengenai penelitian ini adalah kriteria pemilih perempuan terhadap calon legislatif, pendapat/penilaian, serta keputusan dalam memilih calon legislatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Orientasi Kognitif Pemilih Perempuan

Orientasi Kognitif adalah pengetahuan, kesadaran dan kepercayaan terhadap caleg, atau berkenaan dengan apa-apa yang dipercayai oleh pemilih perempuan yang berkaitan erat dengan caleg. Orientasi kognitif mengenai penelitian ini adalah pengetahuan pemilih perempuan yang berkaitan dengan pemilu dan calon legislatif. Komponen-komponen tersebut antara lain:

- Pengetahuan tentang keikutsertaan pemilih perempuan dalam pemilu
- Pengetahuan pemilih perempuan mengenai penyelenggaraan pemilu legislatif

- Pengetahuan pemilih perempuan mengenai caleg
- Pengetahuan pemilih perempuan terkait partai politik yang ikut serta dalam pemilu

11	Calon yang dipilih berpendidikan tinggi	4,07	Cenderung Setuju
Skor Rata-rata Keseluruhan		3,97	Cenderung Setuju

Sumber: Data Olahan Penulis, 2020

Tabel 3.1

Rekapitulasi Jawaban Responden pada Sub Variabel Orientasi Kognitif

No	Indikator	Skor Rata-rata	Kriteria
1	Pemilu itu penting, dan setiap warga negara harus ikut dalam Pemilu	4,66	Cenderung Sangat Setuju
2	Pemilihan umum legislatif adalah memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	4,08	Cenderung Setuju
4	Anggota legislatif dipilih berdasarkan daerah pemilihan	4,30	Cenderung Sangat Setuju
5	Anggota legislatif dipilih sekali dalam 5 tahun	4,27	Cenderung Sangat Setuju
6	Anggota legislatif boleh mencalonkan diri berapa kalipun	2,38	Cenderung Tidak Setuju
7	Calon anggota legislatif berasal dari partai politik	3,63	Cenderung Setuju
8	Pemilu legislatif Tahun 2019 diikuti oleh 15 partai politik	3,91	Cenderung Setuju
9	Calon yang dipilih berdasarkan visi misi dan janji politiknya	4,07	Cenderung Setuju
10	Calon yang dipilih memiliki pengalaman di organisasi kemasyarakatan	4,40	Cenderung Sangat Setuju

Tabel 3.1 menunjukkan bahwa rekapitulasi jawaban responden pada sub variabel orientasi kognitif dalam pemilihan umum legislatif Kota Bukittinggi Tahun 2019, dari 10 indikator pada sub variabel orientasi kognitif diperoleh skor rata-rata jawaban 3,97. Artinya responden *cenderung setuju* dalam memandang objek-objek politik yang ada pada 11 indikator yang termasuk ke dalam orientasi kognitif.

Pemilih perempuan di Kota Bukittinggi sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik ketika penyelenggaraan pemilu legislatif tahun 2019 lalu. Hanya saja sangat disayangkan pemilih perempuan belum mengetahui bahwa tidak ada batasan bagi anggota legislatif untuk mencalonkan diri lagi dalam pemilu selanjutnya.

3.2 Orientasi Afektif Pemilih Perempuan

Orientasi afektif yaitu yang berisi perasaan-perasaan dan emosi-emosi pemilih perempuan terhadap objek politik yaitu caleg. Hal ini menyangkut pada masalah ikatan emosional yang dimiliki oleh pemilih perempuan terhadap caleg, yaitu berupa persamaan suku, ras, jenis kelamin, agama, persamaan dalam pilihan politik (partai) dan lain sebagainya yang meliputi perasaan atau ikatan emosional. Orientasi afektif mengenai penelitian ini adalah perasaan pemilih perempuan yang berkaitan dengan calon legislatif.

Komponen-komponen tersebut antara lain:

- Perasaan pemilih perempuan terkait agama yang dianut oleh caleg
- Perasaan pemilih perempuan terkait suku yang dianut oleh caleg
- Perasaan pemilih perempuan terkait tempat tinggal dari caleg
- Perasaan pemilih perempuan terkait popularitas yang dimiliki oleh caleg
- Perasaan pemilih perempuan terkait penampilan dari caleg
- Perasaan pemilih perempuan terkait caleg yang memberikan bingkisan ketika kampanye
- Perasaan pemilih perempuan terkait pilihan caleg suami dan keluarga terdekat
- Perasaan pemilih perempuan terkait pilihan caleg tokoh adat setempat
- Perasaan pemilih perempuan terkait jenis kelamin dari caleg

6	Calon yang dipilih memberikan bingkisan/hadiah / cendramata sebagai media kampanye	2,38	Cenderung Tidak Setuju
7	Memilih calon karena pilihan suami dan keluarga terdekat	2,47	Cenderung Tidak Setuju
8	Memilih calon karena pilihan tokoh masyarakat setempat (niniak mamak, datuak/kepala suku)	2,52	Cenderung Tidak Setuju
9	Calon yang dipilih mempunyai jenis kelamin yang sama	2,39	Cenderung Tidak Setuju
Skor Rata-rata Keseluruhan		3,03	Cenderung Cukup Setuju

Sumber: Data Olahan Penulis, 2020

Tabel 3.2

Rekapitulasi Jawaban Responden pada Sub Variabel Orientasi Afektif

No	Indikator	Skor Rata-rata	Kriteria
1	Calon yang dipilih agamanya sama	4,02	Cenderung Setuju
2	Calon yang dipilih memiliki kesamaan suku	2,90	Cenderung Cukup Setuju
3	Calon yang dipilih satu kampung halaman	2,96	Cenderung Cukup Setuju
4	Calon yang dipilih satu kampung halaman	3,82	Cenderung Setuju
5	Calon yang dipilih mempunyai penampilan yang baik	3,84	Cenderung Setuju

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa dari 9 indikator pada sub variabel orientasi afektif diperoleh skor rata-rata jawaban 3,03 yang berarti responden *cenderung cukup setuju* dalam memandang objek-objek politik yang ada pada 9 indikator yang termasuk ke dalam orientasi afektif.

Pada pemilu legislatif tahun 2019, pemilih perempuan di Kota Bukittinggi memiliki sejumlah perasaan dan ikatan emosional (orientasi afektif) dengan caleg yang mereka pilih. Pemilih perempuan di Kota Bukittinggi rata-rata memilih caleg yang memiliki agama, suku hingga kampung halaman yang sama dengan mereka. Dalam hal penampilan, pemilih perempuan menyikapinya dengan memilih caleg yang mempunyai

penampilan yang baik. Meskipun suku menjadi bahan pertimbangan bagi

pemilih perempuan dalam menentukan pilihan, namun tidak dengan tokoh masyarakat setempat. Begitu juga dengan pilihan suami dan keluarga terdekat, pemilih perempuan dalam menentukan pilihan ketika pemilu murni karena pilihan mereka sendiri dan bukan dipengaruhi oleh orang lain.

3.3 Orientasi Evaluatif Pemilih Perempuan

Orientasi Evaluatif yaitu keputusan dan pendapat pemilih perempuan tentang caleg yang secara tipikal melibatkan standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan. Didalamnya sudah terdapat dan berisikan pemahaman yang lebih tinggi tentang sistem politik. Seseorang atau kelompok yang memiliki orientasi politik evaluatif, sudah mampu membuat keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik, yang didasarkan kepada kombinasi standar nilai dan kriteria yang didasarkan kepada informasi yang diperoleh dan perasaan tentang hal-hal tersebut.

Orientasi evaluatif mengenai penelitian ini adalah kriteria pemilih perempuan terhadap calon legislatif, pendapat/penilaian, serta keputusan dalam memilih calon legislatif.

Komponennya antara lain:

- Pendapat dan penilaian pemilih perempuan terhadap caleg
- Pendapat dan penilaian pemilih perempuan terhadap partai politik yang mengusung caleg
- Pendapat dan penilaian pemilih perempuan terhadap anggota legislatif perempuan
- Pendapat dan penilaian pemilih perempuan mengenai memilih caleg perempuan dalam pemilu

Tabel 3.3

Rekapitulasi Jawaban Responden pada Sub Variabel Orientasi Evaluatif

N o	Indikator	Skor Rata- rata	Kriteria
1	Calon yang dipilih mempunyai perubahan dibidang sosial ekonomi seperti tingkat pendidikan, pendapatan dsb	4,09	Cenderung Setuju
2	Calon yang dipilih membangun fasilitas umum	4,23	Cenderung Sangat Setuju
3	Calon yang dipilih berasal dari partai politik yang dianggap bisa membawa perubahan secara nasional	4,09	Cenderung Setuju
4	Kinerja anggota legislatif laki-laki lebih baik daripada perempuan	3,13	Cenderung Cukup Setuju
5	Anggota legislatif perempuan akan mementingkan kepentingan perempuan	3,11	Cenderung Cukup Setuju
6	Caleg perempuan harus lebih meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan calon pemilihnya	3,64	Cenderung Setuju
7	Pemilih perempuan tidak harus memilih caleg perempuan	3,64	Cenderung Setuju
Skor Rata-rata Keseluruhan		3,70	Cenderun g Setuju

Sumber: Data Olahan Penulis, 2020

Tabel 3.3 menunjukkan bahwa dari 7 indikator pada sub variabel orientasi evaluatif diperoleh skor rata-rata jawaban 3,70 yang berarti responden *cenderung cukup setuju* dalam memandang objek-objek politik yang ada pada 7 indikator yang termasuk ke dalam orientasi evaluatif.

Sejumlah pendapat dan kriteria penilaian (orientasi evaluatif) pemilih perempuan dalam menentukan pilihan pada pemilu legislatif tahun 2019 lalu adalah program-program perubahan yang dimiliki oleh caleg. Partai politik besar yang mengusung caleg hingga caleg yang membangun fasilitas umum juga menjadi bahan pertimbangan bagi pemilih perempuan di Kota Bukittinggi.

Untuk kinerja anggota legislatif, pemilih perempuan di Kota Bukittinggi memiliki pendapat dan penilaian bahwa kinerja anggota legislatif laki-laki lebih baik daripada kinerja anggota legislatif perempuan sehingga menurut mereka pemilih perempuan tidak harus memilih caleg perempuan.

Pemilih perempuan di Kota Bukittinggi merasa bahwa caleg perempuan kurang dalam hal pendekatan dengan calon pemilihnya misalnya dari segi komunikasi. Padahal pemilih perempuan percaya bahwa anggota legislatif perempuan nantinya akan mementingkan kepentingan perempuan, namun hal ini belum cukup kuat bagi pemilih perempuan untuk menjatuhkan pilihan kepada caleg perempuan ketika pemilu. Hal ini sangat disayangkan, jika saja caleg perempuan lebih gesit dalam mendekati diri dengan para pemilih perempuan ketika masa kampanye, kemungkinan caleg perempuan untuk memenangkan kursi juga lebih besar.

Matrik Hasil Penelitian Orientasi Politik Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Umum Legislatif Kota Bukittinggi Tahun 2019

Responden dalam menjawab pertanyaan yang termasuk aspek orientasi kognitif, rata-rata cenderung setuju apabila calon yang dipilih berdasarkan visi misi dan janji politiknya. Selain itu responden juga cenderung setuju apabila jenjang pendidikan yang telah ditempuh calon juga menjadi bahan pertimbangan dalam memilih.

Bagi responden, pengalaman caleg di organisasi merupakan salah satu hal penting dalam menentukan pilihan, karena dari tabel diatas dapat dilihat pada indikator ini diperoleh rata-rata cenderung sangat setuju.

Agama yang dianut oleh calon dan kegiatan pertemuan/tatap muka yang dilakukan oleh calon merupakan hal yang cukup kuat bagi pemilih dalam menentukan pilihannya, karena dalam menjawab indikator-indikator ini rata-rata skor jawabannya masuk dalam kriteria cenderung setuju. Selain dua indikator tersebut, yang termasuk dalam aspek orientasi afektif dengan rata-rata skor jawaban cenderung setuju adalah indikator mengenai penampilan dan keterkenalan pemilih dengan caleg. Kemudian, calon yang dipilih memiliki kesamaan suku, kawasan tempat tinggal/kampung halaman memiliki rata-rata skor jawaban dalam kriteria cenderung cukup setuju.

Responden memilih cenderung tidak setuju jika calon yang dipilih karena mengikuti pilihan suami atau keluarga terdekat dan karena mengikuti pilihan tokoh masyarakat setempat (niniak mamak, datuak/kepala suku). Ini

menunjukkan bahwa responden dalam memilih tidak terpengaruh oleh pilihan orang lain dan murni pilihan mereka sendiri. Begitu juga dengan indikator calon yang dipilih memberikan bingkisan/hadiah/cenderamata sebagai media saat kampanye, responden juga memilih cenderung tidak setuju.

Calon yang dipilih mempunyai perubahan dibidang sosial ekonomi, membangun fasilitas umum dan berasal dari partai politik yang dianggap bisa membawa perubahan secara nasional merupakan salah satu bahan yang menjadi pertimbangan bagi responden dalam memilih, karena pada indikator-indikator yang termasuk dalam aspek evaluatif ini responden rata-rata memilih jawaban pada kriteria cenderung setuju.

Responden cenderung tidak setuju apabila calon yang dipilih mempunyai jenis kelamin yang sama dengan responden. Rata-rata responden memilih caleg laki-laki pada pemilu legislatif 2019. Dari total 100 responden hanya 30% yang memilih calon perempuan. Ini menunjukkan bahwa masih minimnya suara untuk caleg perempuan pada pemilu legislatif 2019. Indikator kinerja anggota legislatif laki-laki lebih baik daripada kinerja anggota legislatif perempuan, responden rata-rata memilih jawaban cenderung cukup setuju dan diikuti dengan cenderung setuju bahwa memilih perempuan tidak harus memilih caleg perempuan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada pengaruh banyaknya memilih perempuan dengan caleg perempuan yang terpilih pada

pemilihan umum legislatif Kota Bukittinggi tahun 2019. Penelitian ini menunjukkan bahwa sikap-sikap egaliter dalam budaya Minangkabau terhadap perempuan yang menduduki jabatan legislatif tidak terkait dengan perolehan suara yang didapat oleh calon legislatif perempuan.

Orientasi politik atau cara pandang yang mendasari pemikiran perempuan minangkabau di Kota Bukittinggi dalam memilih adalah adanya kesamaan kampung halaman dan kawasan tempat tinggal dengan calon legislatif. Agama, suku, penampilan dan keterkenalan dengan calon legislatif juga menjadi bahan pertimbangan bagi memilih perempuan dalam menentukan pilihan. Minimnya suara untuk caleg perempuan di Kota Bukittinggi dikarenakan berkembangnya pola pikir bahwasanya kinerja laki-laki lebih baik daripada kinerja perempuan serta kurangnya komunikasi antara caleg perempuan dengan calon pemilihnya, sehingga memilih perempuan di Kota Bukittinggi merasa tidak harus memilih caleg perempuan dalam pemilu. Minat dan motivasi politik yang rendah menyebabkan kesadaran terhadap pentingnya perempuan dalam berpolitik juga rendah.

Saran

- Bagi memilih perempuan di Kota Bukittinggi, kedepannya diharapkan lebih melirik keberadaan caleg perempuan karena keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bukittinggi masih sangat minim. Jumlah penduduk perempuan di Kota Bukittinggi mencapai lebih dari 50%. Mereka memerlukan suara untuk mewakili kepentingan-kepentingan perempuan

dalam pengambilan kebijakan yang berdampak pada kehidupan perempuan itu sendiri misalnya dari segi lingkungan hidup, pendidikan dan kesehatan

- Bagi caleg perempuan yang akan mengikuti kontestasi pemilu selanjutnya, diharapkan lebih agresif mendekati diri kepada calon pemilih terutama pemilih perempuan. Karena dari penelitian ini dapat dilihat bahwa para pemilih perempuan mengharapkan caleg perempuan agar lebih meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan calon pemilihnya
- Bagi partai politik yang ikut serta dalam pemilu diharapkan tidak menempatkan caleg perempuan sebagai prasyarat atau hiasan belaka. Partai politik diharapkan betul-betul mengedepankan dan mendukung caleg perempuan yang memiliki sumber daya serta kemampuan politik yang serius dengan segala kemampuan yang mereka miliki
- Untuk pemerintah dan organisasi perempuan diharapkan lebih gesit lagi dalam mensosialisasikan pentingnya perempuan dalam berpolitik
- Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan, diharapkan dapat lebih teliti lagi dalam mencari tahu bagaimana orientasi politik para pemilih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Armadi, Wuwung. 2019. *Orientasi Politik Pemilih, Studi Pemilihan Anggota Legislatif Riau Dapil Riau II*. Pekanbaru:Marpoyan Tujuh

Almond, Gabriel dan Verba, Sidney. 1984. *Budaya Politik Tingkah Laku*

Politik dan Demokrasi di Lima negara. Terjemahan oleh Simamora, Sahat. Jakarta:Bina Aksara

Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta:Rineka Cipta

Budiardjo, Miriam. 2014. *Dasar-dasar Ilmu politik*. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama

Bungin, Burhan. 2004. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta:KENCANA

Darmawan, Ikhsan. 2015. *Mengenal Ilmu Politik*. Jakarta:Buku Kompas

Fahmi, Khairul. 2011. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta:PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Huntington, Samuel dan Nelson, Joen. 1990. *Partisipasi Politik di Negara berkembang*. Jakarta:RINEKA CIPTA

Maksudi, Beddy Iriawan. 2015. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada

Maes'od, Mochtar. 1986. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta:Gajah Mada University Press

Siregar, Syofian. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*. Jakarta:KENCANA

Verayanti, Lany dkk. 2003. *Partisipasi Politik Perempuan Minangkabau dalam Sistem Masyarakat Matrilineal*. Padang:LP2M Padang

Naskah Publikasi, Jurnal, Skripsi, Tesis

Armadi, Wuwung. 2017. *Orientasi Politik Pemilih Memilih Nomor Urut 1 pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Riau tahun 2014 (Studi Kasus Daerah Pemilihan Tiau II)*. Skripsi.

FISIP, Ilmu Pemerintahan, Universitas Riau

- Nularna, Patminah. 2016. *Pengaruh Orientasi Politik Pemilih Perempuan Terhadap Keputusan Memilih Caleg Perempuan Pada Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Siak*. Tesis. Pasca Sarjana (Magister) Ilmu Politik, Universitas Riau
- Kurniawan, Muhammad Wira. 2017. *Orientasi Politik dan Bentuk Keterlibatan Paguyuban Mahasiswa Bengkalis di Pekanbaru pada Pilkada Bengkalis Tahun 2015*. Skripsi. FISIP, Ilmu Pemerintahan, Universitas Riau
- Surbaini dkk. 2014. *Orientasi Politik Masyarakat Terhadap Pemilihan Partai Politik Di Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Volume 4, Nomor 8

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

Sumber-sumber Lainnya

<https://bukittinggikota.bps.go.id>

<https://www.neliti.com>id>jom-fisip-unri>